

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan semata-mata”.¹ Sesuai amanat konstitusi bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, setiap tingkah laku masyarakat yang merupakan aktivitas sosial harus patuh pada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan teratur.

Hukum adat merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakan dengan negara-negara lain di dunia, keberadaan hukum adat ini sangat diakui oleh negara sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub di dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Leon Duguit dalam Yulies Tiena Masriani (2012:6) mendefinisikan, “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi

¹ Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta Pusat. Penerbit Erlangga. Hal. 184.

bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”². Suriyaman (2015:4) menyatakan “bahwa adat merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikanya “hukum adat””³. Menurut T.O. Ihromi (2000:19) “arti yang paling inti dari adat ialah pedoman berlaku atau cara berlaku, yang sudah diikuti oleh sebagian besar warga suatu masyarakat dan dianggap pantas untuk situasi tertentu atau pada saat menjalankan peranan tertentu”.⁴

Adat dan hukum adat memang sangat berbeda, adat hanya kebiasaan yang tidak mengandung sanksi, sementara hukum adat terdapat sanksi bagi yang melanggar. Hukum adat diyakini oleh masyarakat secara turun temurun yang menjadi cerminan kepribadian suatu daerah tertentu. Eksistensi hukum adat menjadi khazanah keilmuan dan kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kekokohan fondasi hukum adat patut diakui, sejarah telah mencatat bahwa Indonesia selama tiga setengah abad dijajah Belanda ditambah tiga setengah tahun oleh Inggris dengan hukum yang dianut oleh kedua negara tersebut, namun alhasil, negara Indonesia masih tetap meyakini hukum warisan para leluhur dan nenek moyangnya sebagai hukum yang abadi. Koentjaraningrat (1966: 32), menyebutkan “bahwa tiap-tiap masyarakat, baik yang amat kompleks maupun yang amat sederhana bentuknya,

² Yulies Tiena Masriani. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 6.

³ A. Suriyaman Mustari Pide. 2015. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta. Prenadamedia Group. Hal. 4

⁴ T.O. Ihromi. 2000. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hal. 19.

tentunya mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau kontrol social”.⁵

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan seperti halnya ilmu-ilmu lain harus dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menelusuri napak tilas hukum adat yang lahir sebagai ilmu pengetahuan.

“Hukum adat sebagai ilmu pengetahuan lahir pada tanggal 3 Oktober 1901, yaitu pada hari ketika van Vollenhoven menyampaikan kuliah inaugurasinya di Universitas Leiden sebagai Profesor tentang hukum konstitusi dan administrasi ditanah seberang dan hukum adat di Hindia Timur”⁶. Menjadi khazanah sejarah bangsa Indonesia secara turun temurun apabila hukum adat ini dipelajari dan diajarkan serta dipelihara, sehingga menjadi pengetahuan bagi dunia akan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Hukum adat yang menjadi identitas daerah memiliki beragam corak penerapan, memang harus diakui pada kenyataannya hukum adat tertentu melanggar hak asasi yang melekat kepada setiap manusia merdeka, kemerdekaan manusia mendapatkan jaminan perlindungan dari Negara, sebagaimana amanat konstitusi, melindungi segenap warga Negara, Indonesia sebagai Negara hukum harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap dualisme hukum yang berlaku.

Suriyaman (2015:172) “Dalam kasus salah satu adat suku Naulu yang terletak di daerah Maluku Tengah misalnya, proses adat membutuhkan kepala

⁵ Koentjaraningrat. 1966. *Pengantar Antropologi*. Jakarta. Yayasan Penerbit Indonesia. Hal. 32.

⁶ Hilman Hadikusumah. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19.

manusia sebagai alat atau perangkat proses ritual adat suku Naula”.⁷ Melihat kenyataan demikian, Negara dihadapan dengan dilema hukum, satu sisi perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negaranya adalah merupakan suatu kewajiban Negara, disisi lainya Negara menjamin eksistensi masyarakat hukum adat.

Menjadi perhatian bahwa, dalam kenyataannya, praktek penyelesaian perkara pidana oleh lembaga pengadilan adat bukan perso’alan yang baru. Dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana dinyatakan bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Hal ini mengingatkan kita bahwa sejatinya roh dari hukum Indonesia adalah hukum adat itu sendiri. Berangkat dari kekuatan keyainan akan hal itu, beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan lembaga peradilan adat sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk didalamnya perkara pidana.

Khususnya di Indonesia sebagai negara yang sangat kompleks adat istiadatnya juga masih menggunakan metode penyelesaian perkara dengan metode hukum adat. Salah satunya di *Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat* yang menggunakan sistem hukum adat Baja dalam proses penyelesaian masalah pidana yang terjadi diruang lingkup kehidupan masyarakat, hal ini menjadi persoalan baru bagi masyarakat moderen dalam melihat kepastian

⁷ A. Suriyaman Mustari Pide. *Op. Cit.* Hal. 172.

hukum terhadap para pelaku kejahatan, baik dari sistem peradilan hingga pada metode penghukumannya.

Karamabura merupakan daerah yang masih memberlakukan hukum adat untuk menyelesaikan masalah seperti halnya kasus pencurian. Apabila tertangkap tangan orang yang melakukan pencurian, maka orang tersebut akan dihukum dengan cara di arak Baja keliling kampung dengan membawa/memikul barang curiannya, kalau ayam yang di curi maka ayam digigit sambil dia berjalan dan mengucapkan kata *nahu ra mpangaku, aina karawi bunesi ntika karawi ba nahu* (saya telah mencuri, jangan meniru seperti yang saya lakukan). Pemberlakuan hukuman Baja tersebut terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu, seperti kasus pencurian, asusila dan miras serta pekonsumsi obat terlarang⁸.

Dalam amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertepatan pada tanggal 18 Agustus 2000 diadakan perubahan terhadap pasal 28i angka 3, disebutkan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁹ Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2002 dilakukan perubahan pula, dimana pada pasal 32 angka 1 terdapat ketentuan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.¹⁰

Hukum adat memang mengalami perkembangan pengakuan di dalam hukum nasional. Pengakuan negara terhadap hukum nasional berserakan diberbagai aturan dan undang-undang. Hal ini merupakan upaya negara sebagai bentuk pengakuan dan kesadaran negara akan pentingnya mempertahankan eksistensi hukum adat. Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana

⁸ Wawancara dengan H. Hasan Agung, Ketua LMA, Dompur, 6 Januari 2018.

⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28i (3).

¹⁰ Ibid pasal 32 (1).

nasional, dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 3 sub (b) UU Drt No.1/1951, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 50 ayat 1 UU No. 48/2009. Pasal 51 UU No.21/2001. Serta berlakunya asas legalitas formal dan asas legalitas materiel. Kemudian hukum pidana adat dalam RUU KUHP 2008 yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4, Pasal 11 ayat 2, serta Pasal 67 dan 12 RUU KUHP 2008.

Ditengah arus globalisasi yang menghawatirkan , maka sangat perlu untuk mengokohan eksistensi hukum adat, diantaranya hukum adat Baja. Apabila hukum adat Baja tidak mendapatkan perhatian, maka dapat diperkirakan hukum adat Baja akan hilang, dan akan berakibat pada hilangnya salah satu warisan bangsa, yang tidak ternilai harganya. Salah satu bentuk perhatian terhadap hukum adat Baja adalah dengan melakukan penelitian tentang hukum adat Baja tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat hukum adat Baja dalam penelitian ini dengan judul *“Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Prespektif Hukum Adat Baja Pada Masyarakat (Suku Donggo)Desa Karamabura”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode hukum adat Baja.
2. Apa implikasi terhadap hukum positif atas keberlakuan hukum adat Baja dalam penyelesaian perkara pidana.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode hukum adat Baja
2. Mengetahui dan memahami implikasi terhadap hukum positif atas keberlakuan hukum adat Baja dalam penyelesaian perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

Manfaat teoretis penelitian ini adalah diharapkan dapat menyumbangkan suatu pemikiran yang bersifat teoretik dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat penelitian bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Dompu. Diharapkan agar dapat dijadikan bahan koleksi daerah, sekaligus dipublikasikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat Dompu lebih mengenal hukum adat (Baja) yang merupakan kekayaan daerahnya.
- 2) Manfaat penelitian bagi pembaca, dapat memberi penjelasan dan menumbuhkan sikap positif masyarakat atau pembaca terhadap keberadaan hukum adat (Baja). Dengan demikian, hukum adat (Baja) tetap hidup, berkembang dan digunakan oleh masyarakat sebagai sistim pengendalian sosial.

- 3) Bagi peneliti sejenis, dapat dijadikan sebagai acuan atau kerangka pemikiran untuk penelitian selanjutnya.
- 4) Bagi lembaga pendidikan, temuan pragmatis penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

E. Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat¹¹. Penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga yuridis empiris merupakan penggabungan antara dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian sosiologis. Peneliti akan mengkaji secara sosiologi terkait penyelesaian dan efektivitas hukum adat yang berlaku di masyarakat, namun juga akan mengkaji kedudukan dan pengakuan hukum nasional (Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP) terhadap hukum adat.

b. Lokasi Penelitian

Berhubung Kabupaten Dompu memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak, maka diambil satu desa pengamatan yaitu di Desa Krama Bura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu-NTB.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karama Bura dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. ***Pertama***, hukum adat (Baja) masih hidup dan digunakan oleh masyarakat Karama Bura yang diyakini sebagai alat pengontrol sosial. Selain itu, hukum adat (Baja) masih dipertahankan dengan

¹¹ *Pedoman Penulisan Hukum*. 2016. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 16.

baik di Desa Karama Bura. Oleh karena itu, masyarakat Karama Bura masih meyakini hukum adat (Baja) perlu dan harus dipertahankan. **Kedua**, Karama Bura masih satu teritorial dengan desa tempat tinggal peneliti, yaitu sama-sama wilayah kabupaten Dompu dan peneliti cukup paham tentang watak, karakter, sikap, serta hukum adat (Baja) masyarakat Karama Bura, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang otentik.

c. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹². Peneliti akan memperoleh data primer ini dengan terjun langsung ke desa Karama Bura.

2) Data Sekunder

Sebagai penopang data primer, tentunya perlu menggunakan data tambahan yang disebut sebagai data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan¹³ (UUD NRI 1945 dan KUHP).

d. Data Tersier

Adapun yang dimaksud data tersier adalah “jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus,

¹² Ibid, hal. 106

¹³ Ibid

glossary, dan lain-lain”¹⁴. Untuk memperkaya khazanah referensi, tidak menutup kemungkinan peneliti akan memperoleh referensi-referensi lain yang masih seialur dengan subjek penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

1) Pengamatan (Observation)

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan¹⁵. Dalam penelitian ini, peneliti hadir di lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung pada subjek penelitian yaitu berkaitan dengan hukum adat Baja pada masyarakat suku Donggo di desa Karama Bura kecamatan Dompu kabupaten Dompu.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan satu proses interaksi dan komunikasi¹⁶. Interaksi peneliti dengan ketua adat merupakan rangkaian peristiwa penggalan informasi terkait penerapan pidana adat Baja.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder oleh peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian

¹⁴ *Pedoman Penulisan Hukum*. 2012. Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 17.

¹⁵ Kartini Kartono. 1980. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung. Alumni. Hal.142.

¹⁶ Muslan Abdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang. UMM Press. Hal. 114.

kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian¹⁷.

c. Data Tersier

Berkaitan dengan data tersier, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepuustakaan

f. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (*deskripsi*) dengan kata-kata atas temuan-temuan terkait penyelesaian perkara pidana prespektif hukum adat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab yang tersusun secara sistematis (berurutan) sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Sitematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan gambaran umum yang dibahas, sehingga merupakan pengantar dalam pembahasan pada bab berikutnya, sub babnya terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, rujukan teori, metode penelitian, rencana jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁷ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 107.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam *bab* ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pada pembahasan ini akan dikaitkan dengan kajian teori serta landasan yuridis yang tepat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum.